RENCANA KERJA
TAHUN 2027

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2027 adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Renja PD Tahun 2027 dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2027 disusun bertujuan untuk :

a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2027.

Pasal 4

(1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2027 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2027 dan rencana strategis PD.
(2) Renja PD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Renja PD Tahun 2027 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
    c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
    d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD;
    e. bab V memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    f. bab VI memuat penutup.
(2) Renja PD Tahun 2027 terdiri dari:
    a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
    b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
    d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
    e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
    f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
    i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
    k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
    p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
    q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
    r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
    s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
    t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
    u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
    v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
    w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
    x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
    y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
    z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
ll. Rencana Kerja Kecamaan Luak;
mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

(3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(12) Rencana Kera Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
(28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z

tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana Kerja Kecamatan Guguak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2027 dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

(1) Perubahan Renja PD Tahun 2027 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

(2) Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2027 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 36

DAFTAR ISI

Kata Pengantar……i

Daftar Isi……ii

Daftar Tabel……iii

Daftar Gambar……iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang…… I-1

1.2 Landasan Hukum…… I-9

1.3 Maksud dan Tujuan…… I-11

1.4 Sistematika Penulisan…… I-11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD…… II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD…… II-8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD…… II-10

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…… II-14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… II-18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…… III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD…… III-1

3.3 Program dan Kegiatan…… III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…… IV-1

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)…… V-1

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)…… V-2

BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kalender penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026.....	I-2
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 Dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s.d Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-9
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota.....	II-15
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027.....	II-18
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.....	III-4
Tabel 3.3.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten.....	III-5
Tabel 3.3.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2027.....	III-7
Tabel 3.3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	III-13
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan SubKegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	IV-2
Tabel 4.1	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	IV-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan sesuai system Perencanaan Pembangunan Nasional I-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Persiapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2027 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Demi kelancaran dan pemenuhan ketepatan waktu penyusunan, maka disusun Kalender Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dengan berpedoman kepada Kalender Perencanaan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2027 yang telah disusun oleh Bapelitbang. Adapun jadwal disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kalender Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A	**Persiapan Penyusunan Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja																																						
2	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja																																						
3	Orientasi Mengenai Renja Perangkat Daerah																																						
4	Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan SIPD																																						
B	**Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2027 berdasarkan Ranwal RKPD dan Renstra OPD																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Penyampaian Rancangan Awal Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																						
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																						
C	**Penyusunan Rancangan Renja 2027**																																						
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																						
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan																																						

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																											
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
D	**Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD**																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Daerah																																								
E	**Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027**																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif PD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif yang Ditetapkan di dalam Perkada RKPD																																							
2	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Akhir Renja PD Sudah Selaras dengan Perbup RKPD																																								
F	**Penetapan Renja PD 2027**																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																													
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyampaian Rancangan Akhir Renja Semua PD oleh Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Selanjutnya Ditetapkan dengan Perkada																																						
2	Penetapan Draft Perkada Renja menjadi Perkada Renja PD Se-Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi Perangkat Daerah																																						

I. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD 2027 oleh tim Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD berdasarkan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.

II. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan Rencana Kerja (Renja) yang disempurnakan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD kemudian dibahas dan disempurnakan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.Penyajian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rencana Kerja (Renja).

Selanjutnya , Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Bapelitbang untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi RKPD. Berdasarkan hasil verifikasi dari tim di Bapelitbang, maka Rencana Kerja (Renja) disempurnakan dan hasil penyempurnaannya disampaikan kembali ke Bapelitbang.

III. Pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah

Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

IV. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam

program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD.

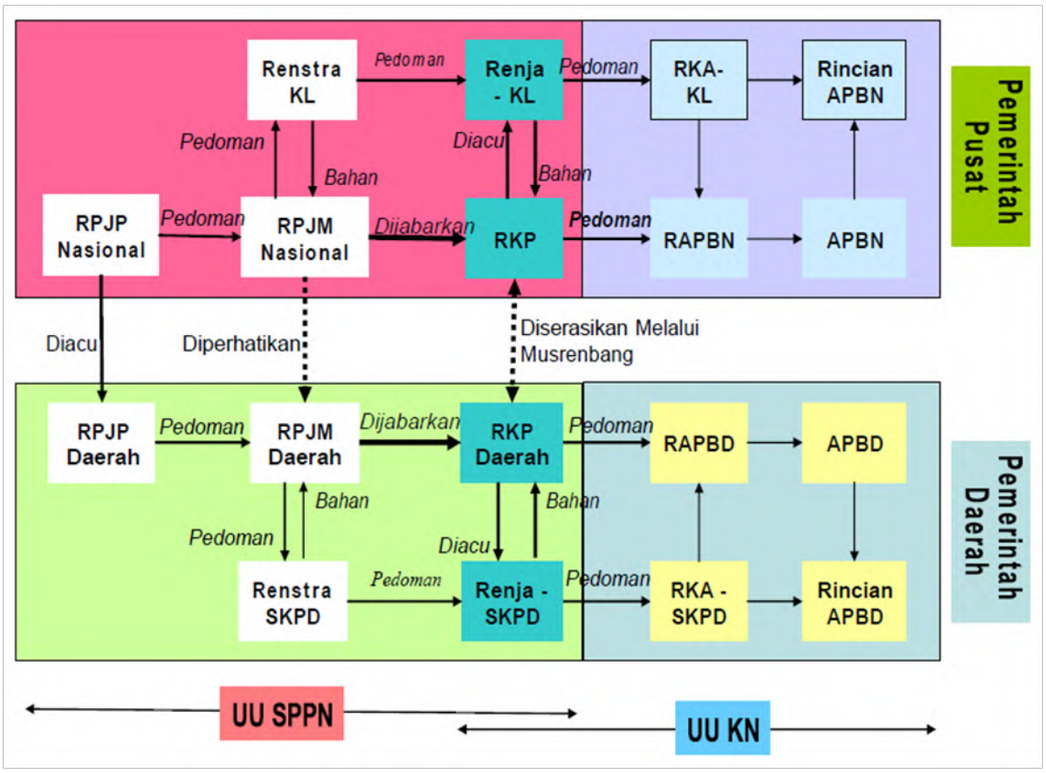
V. Penetapan

Dalam hal penetapan Rencana Kerja (Renja), Sekretariat DPRD menyerahkan Rencana Kerja (Renja) ke Bapelitbang Kab.Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.1.1 Keterkaitan Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis dab Renja K/L Serta Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan APBD.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat, maupun antara pemerintah dengan legislatif yaitu kebijakan umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar.1.1
Keterkaitan Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Sesuai
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20025 – 2045;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2027 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Sekretariat DPRD secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2027 sesuai dengan urusan dan kewenangan Sekretariat DPRD.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD untuk tahun 2027.

Berkaitan dengan maksud di atas, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2027 ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2027.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat DPRD dan bagian - bagian di Sekretariat DPRD.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD pada tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2027 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

I. Pendahuluan
   Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.
II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renj) Sekretariat DPRD Tahun Lalu
   Berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan sebagainya.
III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Memuat telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2027 dan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2027.

IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

Berisi ketentuan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERENGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun 2025 dan realisasi Renstra Sekretariat DPRD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Sekretariat dan realisasi APBD. Dari hasil review yag dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD.Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 disajikan Tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Lancarnya administrasi Perkantoran**	**100%**	**91,52%**	**100%**	84,45%	84,45%	100%	91,99%	91,99%
4.02.01.2.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	100%	100%	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**83,57%**	83,57%	**100,00%**	94,52%	94,52%
4.02.01.2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100,00%**	**66,66%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%	**100,00%**	88,89%	88,89%
4.02.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**80%**	**100%**	**80%**	80%	**100%**	86,67%	86,67%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%
4.02.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%
4.02.01.2.15	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**100%**	**76,98%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	92,33%	92,33%
4.02.01.2.16	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**92,59%**	93%	**100%**	97,53%	97,53%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**100%**	**80,99%**	**100%**	**94,80%**	94,80%	**100%**	91,93%	91,93%
4.02.02.2.01	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**100%**	**51,96%**	**100%**	**81,25%**	81,25%	**100%**	77,74%	77,74%
4.02.02.2.02	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.02.2.03	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%	**100,00%**	100,00%	100,00%
4.02.02.2.04	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**87,66%**	87,66%	**100,00%**	95,89%	95,89%
4.02.02.2.05	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**93,33%**	93,33%	**100,00%**	97,78%	97,78%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Tahun 2025-2029	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= 5+7+9	11= (10/4)
4.02.02.2.06	**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%
4.02.02.2.07	**Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	100%	100%
4.02.02.2.08	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**96,15%**	96,15%	**100%**	98,72%	98,72%

Selanjutnya evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi renja tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 84.45%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 84.45%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
   e) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, beberapa kegiatan direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 94.80%, sehingga tingkat realisasi adalah sebesar 94.80%. Adapun kegiatan yang telah tercapai targetnya antara lain:
   a) Pembahasan Kebijakan Anggaran;
   b) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
   c) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
   d) Pembahasan Kerjasama Daerah; dan

II. Program dan kegiatan yang <u>tidak</u> memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Adapun program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, ada kegiatan yang pencapaian targetnya kurang dari 100% diantaranya :
   a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
   d) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Pada Sub kegiatan tersebut di atas, belum tercapainya target realisasi yang direncanakan disebabkan karena intesitas pekerjaan yang tinggi sehingga kegiatan tidak terlaksana.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada umumnya semua kegiatan telah mencapai target, hanya beberapa kegiatan yang belum mencapai target di antaranya ;

a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
c) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
d) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Bab ini berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait sesuai yang ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sehingga tidak ada penjelasan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 (TC-30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM / standar nasional	IKK/IKD	IKU KD	IKU PD (Sekretariat DPRD)	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2025 (thn n-2)	Tahun 2026 (thn n-1)	Tahun 2027 (thn n)	Tahun 2028 (thn n+1)	Tahun 2025 (thn n-2)	Tahun2026 (thn n-1)	Tahun 2027 (thn n)	Tahun 2028 (thn n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		V		V	80%	80%	80%	80%	94,11%	Tidak Ada Data	80%	80%	Tercapai
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD		V		V	65	70	71	71	74,65	Tidak Ada Data	71	71	Tercapai
3	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N		V		V	Tidak Ada Data	9	9	9	3	Tidak Ada Data	9	9	Belum Tercapai
4	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		V		V	Tidak Ada Data	80%	80%	80%	33,33%	Tidak Ada Data	80%	80%	Belum Tercapai
5	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		V		V	Tidak Ada Data	85%	85%	85%	95,99%	Tidak Ada Data	85%	85%	Belum Tercapai

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilihat berdasarkan table 2.2 sesuai dengan IKD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota
b. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target pencapaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD berupa indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Lima Puluh Kota terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasiltasi kegiatan sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 94.11% atau sebanyak 32 orang menyatakan puas atas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dan untuk nilai akuntanbilitas Kinerja Sekretariat DPRD juga telah mencapai target 74.65.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap *stakeholders*nya.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain:

1. Pelayanan terhadap kegiatan rapat-rapat DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pelayanan rapat-rapat DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal Ini terbukti setiap jadwal rapat / persidangan yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir persidangan mulai dari penyiapan administrasi rapat, konsumsi sampai risalah persidangan.
2. Pelayanan terhadap kegiatan kunjungan kerja anggota DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Kunjungan Kerja DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal. Ini terbukti setiap jadwal kunjungan kerja yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan kunjungan kerja DPRD mulai dari penyiapan administrasi Kunjungan Kerja, mendampingi langsung ke lapangan, penyusunan laporan kunjungan kerja DPRD serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.
3. Pelayanan terhadap kegiatan Bimbingan Teknis DPRD
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Bimbingan Teknis anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal . Ini terbukti setiap jadwal Bimtek yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara.Sekretariat DPRD telah melayani seluruh

proses dari awal sampai akhir kegiatan Bimtek DPRD mulai dari penyiapan administrasi Bimtek, mendampingi langsung kegiatan Bimtek, penyusunan laporan kegiatan Bimtek DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Bimtek yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.

4. Pelayanan terhadap kegiatan Reses Anggota DPRD ke daerah pemilihannya.
   Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan Reses anggota DPRD secara umum sudah dilakukan upaya secara maksimal,Ini terbukti setiap jadwal Reses yang disusun oleh Badan Musyawarah tidak ada yang tidak terselenggara. Sekretariat DPRD telah melayani seluruh proses dari awal sampai akhir kegiatan Reses DPRD mulai dari penyiapan administrasi Reses, mendampingi langsung kegiatan Reses, penyusunan laporan kegiatan Reses DPRD serta penyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan atas hasil kegiatan Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dan lain sebagainya.
5. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan Anggota DPRD seperti melalui *Whatsapp group.*

Selain itu keberhasilan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2025 sudah cukup optimal didapat dari hasil tanya jawab berupa kuisioner dengan seluruh anggota DPRD,dimana untuk tahun 2025 ini, dari 35 orang anggota DPRD, 32 orang (91.42%) diantaranya menyatakan puas atas pelayanan-pelayanan kegiatan administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk Informasi, ukuran dan skala pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan teknik analisis data berupa kuisioner.

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa kelemahan, adapun kelemahan itu antara lain:

1. Belum semua ASN dilingkungan Sekretariat DPRD yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawabnya sehingga adakalanya terjadi miskomunikasi dengan anggota DPRD.
2. Belum semua ASN dilingkungan Sekretariat DPRD yang mempunyai sumber daya yang memadai sehingga memperlambat pelaksanaan tugas anggota DPRD.
3. Adanya sebagian dari ASN dilingkungan Sekretariat DPRD terutama yang langsung terkait dengan pelayanan persidangan setengah hati melayani anggota DPRD sehingga berdampak pada ketidaknyamanan hubungan antara Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD itu sendiri.
4. Masih kurangnya sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan persidangan seperti sound sistem

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap anggota DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya koordinasi antar bagian-bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani seluruh kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
2. Lemahnya sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terhadap kelancaran tugas anggota DPRD.
3. Adanya ego sektoral masing-masing bagian dilingkungan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
4. Belum optimalnya rasa kebersamaan sesama aparataur dilingkungan Sekretariat DPRD dalam melayani anggota DPRD
5. Kurangnya pemahaman masing-masing personil ASN terhadap tugas dan fungsinya.
6. Adanya penempatan personil yang tidak sesuai keahliannya dengan tugas yang diembannya.
7. Belum optimalnya partisipasi ASN dalam mendukung kelancaran tugas anggota DPRD.

2.3.3 Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melakasanakan pelayanan dan memfasilitasi DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka membahas suatu Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang merupakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. Fasilitasi kegiatan dilakukan dalam bentuk penunjang kegiatan Rapat/Komisi/Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk pembahasan suatu Rancangan Peraturan melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.Untuk menyelaraskan dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMD tahun 2025 - 2029 tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi sesuai dengan peran Sekretariat DPRD. Adapun misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan rapat-rapat dan persidangan DPRD.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kunjungan kerja, reses dan penyaluran aspirasi masyarakat oleh pimpinan dan anggota DPRD ;

3. Memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan konsultasi dan koordinasi pemerintah dan pembangunan oleh pimpinan dan anggota DPRD ;
4. Memberikan pelayanan prima terhadap kegiatan pengembangan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD ;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana DPRD dan Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelenggaraan fungsi dan tugas-tugas DPRD ;
6. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan prima terhadap pimpinan dan anggota DPRD ;
7. Meningkatkan perencanaan Sekretariat DPRD dalam mendukung pemberian pelayanan prima.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD.

Merujuk pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD di masa mendatang, tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam beberapa tahun mendatang adalah:

1. Semakin strategisnya peran Sekretariat DPRD dalam pelayanan terhadap DPRD sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam memfasitasi kegiatan DPRD baik dalam persidangan/rapat maupun kegiatan yang terkait dengan reses, kunjungan kerja dan penyelenggaraan bimbingan teknis.
2. Perubahan kebijakan perencanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*;
3. Meningkatnya tuntutan anggota DPRD terhadap pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat waktu.
4. Arus Informasi yang semakin cepat dan penggunaan berbagai aplikasi teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi ASN dalam memfasiltasi berbagai kebutuhan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Penyediaan lahan parkir kantor yang layak dan memadai untuk anggota DPRD dan tamu yang berkunjung ke kantor Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya adalah:

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan system layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal untuk memfasiltasi kebutuhan informasi anggota DPR
3. Adanya peluang meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pelaksanan tugas DPRD dalam ruangan persidangan berupa peralatan sound sistem dan konsumsi serta diluar persidangan berupa kegiatan kunjungan kerja, reses dan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Sedangkan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 sebagai berikut :

a. Rekomendasi
   Meningkatkan Kapasitas Sekretariat DPRD. Peningkatan Kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan DPRD.
b. Kebijakan Strategis
   1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
   2. Meningkatkan Kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
   3. Menyempurnakan system dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
   4. Pembaruan saran dan prasarana penunjang operasional;
   5. Penambahan daya dukung financial dan non financial;
   6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
   7. Hasil Penjadwalan Badan Musyawarah di sosialisasikan ke semua pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD;
   8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan
      kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2027 berdasarkan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada perangkat daerah**		**100**	**43.030.508.940**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada perangkat daerah**		**100**	**43.879.456.959**	.
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**198.492.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**198.492.000**	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**4.295.615.104**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**4.295.615.104**	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.098.244.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.098.244.000**	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**6.661.163.719**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**6.661.163.719**	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	**Persentase Terselenggaranya KegiatanBarang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	Sekretariat DPRD	**100**	**5.096.100.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Terselenggaranya KegiatanBarang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	Sekretariat DPRD	**100**	**5.096.100.000**	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.808.000.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.808.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**8.727.496.300**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**8.727.496.300**	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**14.081.024.541**	**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**14.929.972.560**	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.064.373.276**	**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.064.373.276**	
I	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**		**100**	**17.000.000.000**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**		**100**	**17.000.000.000**	
	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**3.907.579.300**	**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**3.907.579.300**	
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Sekretariat DPRD	**100**	**162.835.000**	**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Sekretariat DPRD	**100**	**162.835.000**	
	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	Sekretariat DPRD	**100**	**77.694.900**	**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	Sekretariat DPRD	**100**	**77.694.900**	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.465.709.200**	**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.465.709.200**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	arget Capaia	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	4	3	5	6	7	9	8	10	11	12
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.139.966.000**	**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Sekretariat DPRD	**100**	**1.139.966.000**	
	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**11.371.900**	**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**11.371.900**	
	Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**29.840.000**	**Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	Sekretariat DPRD	**100**	**29.840.000**	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**10.205.003.700**	**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	Sekretariat DPRD	**100**	**10.205.003.700**	
	Jumlah				**60.030.508.940**	**Jumlah**				**60.879.456.959**	

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas tentang review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2027, dimana pada rancangan awal RKPD tahun 2027 pagu indikatif yang tersedia adalah sebesar Rp 60.030.508.940,- sedangkan kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 60.879.456.959,-.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 mengakomodir usulan dari alat kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2027 ini secara umum tidak menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Sekretariat DPRD tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Renja Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dijelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan Awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana Sesuai dengan Visi Misi RPJPN 2025-2045 dimana Visinya " Indonesia Emas 2045 Negara Nusantara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan". Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 Pendapatan Perkapita Sesuai dengan Negara Maju, Kemiskinan menuju Nol persen dan ketimpangan berkurang, Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat, Daya Saing sumber daya manusia meningkat, Intesitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission.* Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, Tata Kelola, memantapkan Supremasi Hukum Satabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi,

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan Delapan misi (Agenda) pembangunan 2045 terdiri atas:

1. Transformasi sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi hukum Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Kesinambungan pembangunan

Dengan berpedoman pada tema Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 termasuk 8 agenda rancangan Pembangunan Nasional tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, Sekretariat DPRD belum terkait langsung dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dimaksud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapai nya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Sekretariat DPRD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 berdasarkan Visi Misi Kepala daerah

> *"Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan".*

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, Lima Puluh Kota juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti, pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota lima tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata. Bermatabat maksudnya Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisplinanannya, berangkat dari akar budaya minang "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" dalam arti yang seluas-luasnya dengan menjaga pluralitas budaya yang ada di sekitar kita. Maju maksudnya Perekonomian dan masyarakat yang berdaya saing dengan kualitas hidup yang baik, kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur dan ketahanan sosial budaya masyarakat. Sejahtera maksudnya Peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didukung pemerataan pembangunan yang inklusif serta tersedianya sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Berkelanjutan maksudnya Terwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim.

Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Bermatabat , Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang Dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 8 Misi Pembangunan Daerah, untuk Sekretariat DPRD ada pada misi ke 2 ” Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”.

Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dai korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan dari misi ke dua Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran :
   1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
   1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel, dengan sasaran :
   2.1 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
3. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah, dengan sasaran :
   3.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dan Sasaran berdasarkan Inmendagri Nomor 1 tahun 2025 sebagai berikut : “Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD
Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80	80	80	80	80	80	$=\frac{\text{Jumlah anggota DPRD yang puas}}{Jumlah\ Anggota\ DPRD} X100\%$
		1. Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase penetapan Ranperda Tahun N	9	9	9	9	9	9	$=\frac{\text{Jumlah Ranperda}}{Jumlah\ Penetapan\ Ranperda} x100\%$
		2. Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintah	85	85	85	85	85	85	$=\frac{Jumlah\ Realisasi\ Anggaran}{\text{Jumlah Anggaran}} X\ 100\%$
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Sekretariat DPRD	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	65	70	71	71	71	72	NILAI SAKIP

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan program dan kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terkait dengan identifikasi permasalahan untuk penentuan program prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Sekretariat DPRD, dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dengan demikian pada Sekretariat DPRD tidak terkait langsung Penentuan Program Prioritas Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga tidak ditemukan adanya permasalahan untuk dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Sekretariat DPRD.

Tabel 3.3.1
Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Belum tercapai	Belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	Ketersediaan dan peningkatan pagu anggaran yang memadai sesuai kebutuhan riil lembaga DPRD
2	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Belum tercapai	Belum tercapai indikator penyelenggaraan program	1. Penyediaan anggaran operasional yang proporsional terhadap beban kerja Sekretariat DPRD. 2. SDM aparatur yang kompeten dan memahami tata kelola

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai(-) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
				administrasi perkantoran modern
	Persentase Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	Alokasi anggaran yang memadai untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah
3	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tercapai	Belum tercapai indikator penyelenggaraan program	Tersedianya anggaran yang cukup untuk kegiatan rapat, reses, bimtek, dan fasilitasi tugas DPRD
	Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Belum tercapai	belum Terpenuhinya pagu anggaran yang layak dalam memenuhi kebutuhan lembaga DPRD berupa sarana dan prasarana kegiatan tersebut	Penganggaran yang sesuai standar kebutuhan penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

3.3.2 Uraian Garis Besar Mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang dimuat dalam Rencana Kerja tahun 2027 dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah, sementara nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 .

Dari penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah, untuk tahun 2027 berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan 2 program,17 kegiatan dan 73 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

Sedangkan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi atas beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Berdasarkan uraian program dan kegiatan seperti tersebut diatas, dapat di urai menjadi sub-sub kegiatan. Ringkasan program, kegiatan dan sub Kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD
Tahun 2027

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD 7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan/Rehabili

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			tasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
		9. Layanan Administrasi DPRD	1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 2. Fasilitasi Fraksi DPRD 3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan 4. Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 5. Penyusunan Tata Tertib DPRD
		2. Pembahasan Kebijakan	1.Pembahasan KUA dan PPAS

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Anggaran	2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Pembahasan APBD 4. Pembahasan APBD Perubahan 5. Pembahasan Laporan Semester 6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 6. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan 7. Pengawasan Penggunaan Anggaran 8.Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD	1. Pendalaman Tugas DPRD 2. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3. Penyediaan Tenaga

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Ahli Fraksi 4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5. Penyusunan Program Kerja DPRD 6. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah 2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3. Pelaksanaan Reses
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1. Penyusunan Kode Etik DPRD 2. Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Pembahasan Kerjasama Daerah	1. Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 2. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		8. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2. Penyusunan laporan Kinerja DPRD 3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	2	17	73

Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2027 menjadi 2 program 17 kegiatan dan 73 Sub kegiatan

Tabel 3.3.2.1
Pendukung Terhadap Prioritas Kabupaten

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih)	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**22.698.050.300**
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**39.144.000**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.592.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.592.000
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.592.000
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.592.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.592.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.592.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.592.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**3.866.267.003**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.800.730.903
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	43.168.100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.592.000
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.592.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	5.592.000
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.592.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**100.680.000**
				Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.680.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		**739.892.000**
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	201.000.000
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.300.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	0
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	332.592.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		**74.400.000**
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	0

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.400.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	205.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.400.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**1.673.244.737**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	433.120.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak	112.320.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.082.404.737
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.400.000
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		15.186.722.560
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.827.292.560
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	306.930.000
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	52.500.000
			Layanan Administrasi DPRD		**240.800.000**
				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Fasilitasi Fraksi DPRD	5.500.000
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	210.000.000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	25.300.000
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			**5.301.949.700**
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		**1.275.300.000**
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.200.000.000
				Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	0
				Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan	63.100.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Naskah Akademik	
				Penyusunan Tata Tertib DPRD	12.200.000
			Pembahasan Kebijakan Anggaran		**76.300.000**
				Pembahasan KUA dan PPAS	11.200.000
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	11.200.000
				Pembahasan APBD	11.200.000
				Pembahasan APBD Perubahan	11.200.000
				Pembahasan Laporan Semester	10.500.000
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	21.000.000
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		**10.500.000**
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.000.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	500.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	500.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.000.000
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	700.000
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.000.000
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	500.000
				Pembahasan Laporan	2.300.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
			Peningkatan Kapasitas DPRD		**739.849.700**
				Pendalaman Tugas DPRD	207.049.700
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	500.000
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	220.800.000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.500.000
				Penyusunan Program Kerja DPRD	0
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	302.000.000

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		**742.000.000**
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	0
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	7.000.000
				Pelaksanaan Reses	735.000.000
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		**0**
				Penyusunan Kode Etik DPRD	0
				Pengawasan Kode Etik DPRD	0
			Pembahasan Kerjasama Daerah		**0**
				Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	0

No	Prioritas	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
				Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	0
			Fasilitasi Tugas DPRD		**2.458.000.000**
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.800.000.000
				Penyusunan laporan Kinerja DPRD	0
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	8.000.000
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	650.000.000
	Jumlah				**28.000.000.000**

Untuk pendukung prioritas pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terdapat sebanya 2 program, 17 Kegiatan dan 73 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 28.000.000.000,00.

3.3.3 Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan RKPD

Program dan kegiatan yang direncankan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2027 mendasarkan pada rencana kerja Sekretariat DPRD. mendasarkan pada hal tersebut, Pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2027 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Tabel 3.3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada perangkat daerah**		**100**	**22.698.050.300**	**Dana Transfer Umum-DAU**		**100**	**41.221.773.815**	
4	02	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	Sekretariat DPRD	100	39.144.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	198.492.000	
4	02	01	2.02		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	100	3.866.267.003	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	4.902.369.679	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	2.05		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	100	100.680.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.098.244.000	
4	02	01	2.06		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Sekretariat DPRD	100	739.892.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	7.076.905.000	
4	02	01	2.07		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**Persentase Terselenggaranya KegiatanBarang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	Sekretariat DPRD	100	74.400.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.096.100.000	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	2.08		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Sekretariat DPRD	100	776.900.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.808.000.000	
4	02	01	2.09		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sekretariat DPRD	100	1.673.244.737	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	8.727.497.300	
4	02	01	2.15		**Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Sekretariat DPRD	100	15.186.722.560	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	15.249.792.560	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	01	2.16		**Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	Sekretariat DPRD	100	240.800.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.064.373.276	
4	02	02			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**			**5.301.949.700**	**Dana Transfer Umum-DAU**		**100**	**20.000.000.000**	
4	02	02	2.01		**Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Sekretariat DPRD	100	1.275.300.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	4.003.993.300	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	02	2.02		**Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Sekretariat DPRD	100	76.300.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	162.835.000	
4	02	02	2.03		**Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pememrintahan**	Sekretariat DPRD	100	10.500.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	77.694.900	
4	02	02	2.04		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	Sekretariat DPRD	100	739.849.700	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.565.709.200	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		unit
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	02	02	2.05		**Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Sekretariat DPRD	100	742.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	1.191.551.000	
4	02	02	2.06		**Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Sekretariat DPRD	100	0	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	11.371.900	
4	02	02	2.07		**Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah**	Sekretariat DPRD	100	0	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	29.840.000	
4	02	02	2.08		**Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	Sekretariat DPRD	100	2.458.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	IKU Sekretaris DPRD	100	12.957.004.700	
					Jumlah				**28.000.000.000**				**61.221.773.815**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2027 ini disusun mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sektretariat DPRD Tahun 2025 -2029 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 - 2029 serta visi dan misi Kepala Daerah.

Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2027 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 berikut

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SEKRETARIAT DPRD KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		SEKRETARIAT DPRD						**28.000.000.000,00**								**61.221.773.815,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.000.000.000,00**								**61.221.773.815,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**28.000.000.000,00**								**61.221.773.815,00**	
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**22.702.050.300,00**								**41.221.773.815,00**	
			Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	3.850.491.003,00							-	4.845.657.679,00	
			Persentase pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			-	-		-	-	18.788.139.297,00							-	36.120.912.136,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.144.000,00						Sekretariat DPRD		198.492.000,00	
		-						39.144.000,00						Sekretariat DPRD		198.492.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00							-	28.356.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	83,57%	100%	100%	3.867.267.003,00						Sekretariat DPRD		4.902.369.679,00	
		-						3.867.267.003,00						Sekretariat DPRD		4.902.369.679,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	1.000.000,00							-	941.950.256,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1963 Dokumen	3964 Dokumen	4800 Dokumen	4800 Dokumen	43.168.100,00							-	95.216.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00							-	37.808.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	52 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	5.592.000,00							-	28.356.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1264 Orang/bulan	432 Orang/bulan	826 Orang/bulan	840 Orang/bulan	3.800.730.903,00							-	3.742.327.423,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.800.730.903,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.742.327.423,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1264 Orang/bulan	432 Orang/bulan	826 Orang/bulan	840 Orang/bulan	3.800.730.903,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.742.327.423,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			941.950.256,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	0	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	941.950.256,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						43.168.100,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			95.216.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1963 Dokumen	3964 Dokumen	4800 Dokumen	4800 Dokumen	43.168.100,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	95.216.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			37.808.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	37.808.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	52 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			28.356.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	28.356.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						101.680.000,00						Sekretariat DPRD		1.098.244.000,00	
		-						101.680.000,00						Sekretariat DPRD		1.098.244.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	0	18 Orang	1.000.000,00							-	360.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	0	0	1 Paket	75.680.000,00							-	280.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0	0	8 Orang	25.000.000,00							-	458.244.000,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						75.680.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			280.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	0	0	1 Paket	75.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	280.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			458.244.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	0	0	8 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	458.244.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			360.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	0	18 Orang	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						740.892.000,00						Sekretariat DPRD		7.076.905.000,00	
		-						740.892.000,00						Sekretariat DPRD		7.076.905.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	0	0	300 Dokumen	1.000.000,00							-	535.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	332.592.000,00							-	581.679.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	134.000.000,00							-	672.093.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	72.300.000,00							-	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	7 Paket	201.000.000,00							-	4.588.133.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						201.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.588.133.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	7 Paket	201.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.588.133.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						72.300.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			700.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Paket	72.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			535.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen	0	0	300 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	535.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						332.592.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			581.679.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	332.592.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	581.679.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						134.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			672.093.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	134.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	672.093.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74.400.000,00						Sekretariat DPRD		1.096.100.000,00	
		-						74.400.000,00						Sekretariat DPRD		1.096.100.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	2 unit	2 unit	2 unit	74.400.000,00							-	1.096.100.000,00	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						74.400.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			1.096.100.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	74.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.096.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						776.900.000,00						Sekretariat DPRD		1.808.000.000,00	
		-						776.900.000,00						Sekretariat DPRD		1.808.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	205.000.000,00							-	384.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	566.400.000,00							-	1.224.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00							-	200.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						205.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			384.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	205.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	384.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						566.400.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			1.224.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	566.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.224.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.673.244.737,00						Sekretariat DPRD		8.727.497.300,00	
		-						1.673.244.737,00						Sekretariat DPRD		8.727.497.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.082.404.737,00							-	5.917.590.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	112.320.000,00							-	646.926.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	433.120.000,00							-	1.215.051.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	45.400.000,00							-	947.930.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						433.120.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			1.215.051.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	433.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.215.051.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						112.320.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			646.926.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	112.320.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	646.926.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.082.404.737,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			5.917.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.082.404.737,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.917.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.400.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			947.930.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	45.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	947.930.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						15.186.722.560,00						Sekretariat DPRD		15.249.792.560,00	
		-						15.186.722.560,00						Sekretariat DPRD		15.249.792.560,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1960 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	14.827.292.560,00							-	14.827.292.560,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	70 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	52.500.000,00							-	52.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	306.930.000,00							-	370.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						14.827.292.560,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			14.827.292.560,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1960 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	490 Orang/Bulan	14.827.292.560,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	14.827.292.560,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						306.930.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			370.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	4 Paket	5 Paket	306.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	370.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						52.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			52.500.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	70 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	52.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						241.800.000,00						Sekretariat DPRD		1.064.373.276,00	
		-						241.800.000,00						Sekretariat DPRD		1.064.373.276,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							-	141.026.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00							-	108.099.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00							-	515.462.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	0	0	2 Paket	25.300.000,00							-	299.786.276,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			141.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	141.026.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						5.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			108.099.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	108.099.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						210.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			515.462.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	515.462.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						25.300.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			299.786.276,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	6 Paket	0	0	2 Paket	25.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	299.786.276,00	SEKRETARIAT DPRD
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**5.297.949.700,00**								**20.000.000.000,00**	
			Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%	94,80%	100%	100%	5.250.849.700,00							-	19.917.500.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.264.300.000,00						Sekretariat DPRD		4.003.993.300,00	
		-						1.264.300.000,00						Sekretariat DPRD		4.003.993.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	26 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1.187.000.000,00							-	3.785.745.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							-	3.999.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	63.100.000,00							-	63.921.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	21 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00							-	105.517.500,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.200.000,00							-	44.810.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.999.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.999.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						1.187.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.785.745.800,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	26 Dokumen	3 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1.187.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.785.745.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			105.517.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	21 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	105.517.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan PenjelasanKeteranganNaskah Akademik						63.100.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			63.921.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	63.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	63.921.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			44.810.000,00	
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	44.810.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran												Sekretariat DPRD		162.835.000,00	
		-												Sekretariat DPRD		162.835.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	19.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	33.335.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								-	27.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD									7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan									7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						10.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			19.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						21.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			33.335.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	33.335.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						10.500.000,00						Sekretariat DPRD		77.694.900,00	
		-						10.500.000,00						Sekretariat DPRD		77.694.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00							-	6.573.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00							-	4.623.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00							-	3.667.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00							-	46.443.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00							-	4.176.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	700.000,00							-	3.837.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00							-	4.569.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.300.000,00							-	3.806.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						2.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			46.443.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	46.443.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.667.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.667.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.569.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.569.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						2.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.176.900,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.176.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						700.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.837.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.837.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						2.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.623.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.623.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			6.573.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.573.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						2.300.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			3.806.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.806.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						740.849.700,00						Sekretariat DPRD		1.565.709.200,00	
		-						740.849.700,00						Sekretariat DPRD		1.565.709.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	207.049.700,00							-	743.939.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9.500.000,00							-	17.717.400,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	302.000.000,00							-	436.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							-	4.998.600,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	0	2 Orang	2 Orang	500.000,00							-	132.353.500,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	220.800.000,00							-	229.750.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						207.049.700,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			743.939.700,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	207.049.700,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	743.939.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			132.353.500,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2 Orang	0	2 Orang	2 Orang	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	132.353.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						220.800.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			229.750.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	384 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	220.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	229.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						9.500.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan,	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			17.717.400,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	9.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	17.717.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.998.600,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.998.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						302.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			436.950.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	302.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	436.950.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						743.000.000,00						Sekretariat DPRD		1.191.551.000,00	
		-						743.000.000,00						Sekretariat DPRD		1.191.551.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	735.000.000,00							-	1.088.381.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00							-	43.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36 Laporan	0	0	12 Laporan	1.000.000,00							-	59.920.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			59.920.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36 Laporan	0	0	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	59.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						7.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			43.250.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	43.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						735.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			1.088.381.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	735.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.088.381.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						2.000.000,00						Sekretariat DPRD		11.371.900,00	
		-						2.000.000,00						Sekretariat DPRD		11.371.900,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1.000.000,00							-	4.996.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	0	0	1 Laporan	1.000.000,00							-	6.375.000,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.996.900,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.996.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			6.375.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Dokumen	0	0	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	6.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah						2.000.000,00						Sekretariat DPRD		29.840.000,00	
		-						2.000.000,00						Sekretariat DPRD		29.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00							-	11.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							-	18.140.000,00	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			18.140.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.140.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			11.700.000,00	
		Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						2.459.000.000,00						Sekretariat DPRD		12.957.004.700,00	
		-						2.459.000.000,00						Sekretariat DPRD		12.957.004.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00							-	10.030.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00							-	968.148.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00							-	11.973.995.800,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							-	4.830.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						1.800.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			11.973.995.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	11.973.995.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						1.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			4.830.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	4.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						8.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			10.030.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.030.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						650.000.000,00			7.Memperk uat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberanta san korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan.	-	Meningkatk an tata kelola peme rintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGRI TAS"			968.148.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	968.148.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H							**28.000.000.000,00**								**61.221.773.815,00**	

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2027

No	Bidang Urusan	Tahun 2027		Total Pagu (Rp.)	Tahun 2028		Total Pagu Indikatif (Rp.)	Ket
		Jumlah			Jumlah			
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
.11	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2	17	28.000.000.000,00	2	17	61.221.773.815,00	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka rencana kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh Sektretariat DPRD tahun 2027 adalah sebesar Rp. 28.000.000.000,00 untuk 2 program dan 17 kegiatan, sedangkan untuk pagu tahun 2028 diperkirakan juga akan sama sebesar Rp. 61.221.773.815,00.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Target indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Indikator Kinerja Utma (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat DPRD diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD, salah satunya melalui Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Indikator ini mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan rapat, fasilitasi pembentukan peraturan daerah, dukungan fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, pelayanan administrasi persidangan, penyediaan tenaga ahli, pengelolaan keuangan, keprotokolan, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas DPRD.

Pencapaian IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, efektivitas perencanaan dan penganggaran, kecukupan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi antarbagian, serta komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan DPRD.

Dalam pelaksanaannya, Sekretariat DPRD terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), penguatan kapasitas aparatur, percepatan digitalisasi layanan administrasi, peningkatan kualitas penyusunan dokumen persidangan, serta

penguatan koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sekaligus mendukung optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama menjadi tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik yang berkualitas, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi terhadap IKU akan menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pada periode berikutnya sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD
Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		Target Tahun 2027	Ket
			Target	Realisasi		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	94.11	80	
2	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N	Nilai	9	3	9	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	33.33	80	
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	85	95.99	85	
5	Nilai Sakip Sekretariat DPRD	%	65	71.49	71	

5.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang pemerintahan memiliki peran penting dalam memberikan dukungan fasilitatif kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029, salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah (IKK Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci)**.**

IKK ini menjadi representasi kinerja pelayanan karena mengukur sejauh mana layanan Sekretariat DPRD dapat memenuhi ekspektasi dan kebutuhan Pimpinan serta Anggota DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas kedewanan. Survei kepuasan dilakukan secara berkala setiap tahun dengan instrumen yang mengacu pada standar pelayanan dan hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja layanan.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci
Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Tahun 2025		Target Tahun 2027	Ket
			Target	Realisasi		
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	94.11	80	
2	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N	Nilai	9	3	9	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	33.33	80	
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	85	95.99	85	
5	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	85	88.48	85	

BAB VI
PENUTUP

6.1 Catatan Penting

Renja Sekretariat DPRD disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Sekretariat DPRD sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Renja Tahun 2027 adalah Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029.

Renja Sekretariat DPRD memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Sekretariat DPRD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Sekretariat DPRD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

6.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang bersifat operasional dan mempunyai fungsi penting dan strategis untuk menjembatani antara perencanaan pada Sekretariat DPRD dengan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah Sekretariat DPRD yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Sekretariat DPRD serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan PD yakni Renstra dan Renja;
3. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2027;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 yang dilaksanakan secara triwulanan.

6.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2027, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2027 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk Tim Penyusun;

b. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah salah satunya meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
   a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026;
   b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
   c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
   a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
   b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;

d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;

e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.

KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFNI

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**
NOMOR : 000.8.2.4/277/BUP-LK/XII/2025
TANGGAL : 16 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	**SEKRETARIAT DAERAH**	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
2.	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3.	**INSPEKTORAT DAERAH**	
	Inspektur Daerah	Ketua
	Sekretaris	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat Daerah	Anggota
4.	**DINAS KESEHATAN**	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
7.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
8.	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
9.	**DINAS SOSIAL**	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
10.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11.	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
12.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
13.	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH**	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubbag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
15.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
16.	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
17.	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI**	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
18.	**DINAS PERHUBUNGAN**	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
19.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris
	Kabid Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
20.	**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
21.	**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
22.	**DINAS PERIKANAN**	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
23.	**DINAS PANGAN**	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
24.	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
25.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
26.	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
27.	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
28.	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
30.	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS**	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
31.	**KECAMATAN GUGUAK**	
	Camat Guguak	Ketua
	Sekretaris Camat Guguak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguak	Anggota
32.	**KECAMATAN PAYAKUMBUH**	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
33.	**KECAMATAN MUNGKA**	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
34.	**KECAMATAN SULIKI**	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
35.	**KECAMATAN BUKIK BARISAN**	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
36.	**KECAMATAN GUNUANG OMEH**	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
37.	**KECAMATAN LUAK**	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
38.	**KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN**	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umun dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
39.	**KECAMATAN HARAU**	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
40.	**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**	
	Camat Situjuah Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuah Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Anggota
41.	**KECAMATAN AKABILURU**	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
42.	**KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU**	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
43.	**KECAMATAN KAPUR IX**	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I